

CAPTURE DASHBOARD SIWAS ADMIN SATKER

The screenshot displays the SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Admin Dashboard. The browser address bar shows the URL siwas.mahkamahagung.go.id/klarifikasi. The dashboard header is green with the SIWAS logo and the text "SISTEM INFORMASI PENGAWASAN". Below the header, there are navigation links: "Beranda", "Pengaduan", "Cara Melapor", "FAQ", and "Hubungi Kami".

The main content area is titled "DAFTAR KLARIFIKASI PENGADUAN". It features a "Refresh Tabel" button and a "Pencarian Detil" button. A "Tampil" dropdown menu is set to "10". A search bar labeled "Cari:" is present. Below these elements is a table with the following columns: "No", "Tanggal Pengaduan", "Nomor Laporan", "Agenda Nomor", "Perihal", "Uraian", "Status", and "Link". The table currently displays "Tidak ada data".

At the bottom of the table area, it states "Tidak ditemukan 0 pengaduan dari 1,006" with navigation arrows. The footer of the page reads "SIWAS © 2016 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI".



LAYANAN PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN SENGETI

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
Nomor 9 Tahun 2016

tentang
Pedoman Penangan Pengaduan (*Whistleblowing System*)
di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

**LAPORKAN KE PENGADILAN DI TEMPAT HAKIM ATAU APARAT ITU BERTUGAS
ATAU BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG RI**


Pastikan Pengaduan Anda Memuat Identitas Terlapor (Hakim/Pegawai yang diadukan, Tingkat jabatan, dan Instansi yang Bersangkutan).


Pencantuman identitas Anda, sebagai Pelapor akan mempermudah MA dengan Pengadilan untuk memproses pengaduan Anda, memungkinkan Anda untuk mengetahui penanganan terhadap pengaduan.

TUJUKAN PENGADUAN ANDA KEPADA :


1. Ketua Pengadilan Agama Sengeti dimana pelapor bertugas, atau
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, atau
3. Ketua Mahkamah Agung RI, atau
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI, atau
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,


ANDA DAPAT MENGAJUKAN PENGADUAN MELALUI :


 Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung (www.siwass.mahkamahagung.go.id)


 Layanan Pesan Singkat / SMS ke Nomor **0811-9699-900**


Nama Pelapor#NIP/No. Identitas Pelapor#Nama Terlapor#Satuan Kerja#Isi pengaduan.

 Surat Elektronik (email) ke info@pa-sengeti.go.id

 Telepon ke Nomor 0741 - 590061 (PA Sengeti) atau 021 - 29079177 (Badan Pengawasan)

 Meja Pengaduan Pengadilan Agama Sengeti

 Surat, kirim ke Ketua Pengadilan Agama Sengeti Jl. Lintas Timur Komp. Perkantoran Sengeti

 Kotak Pengaduan :

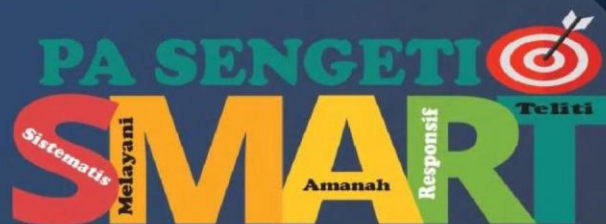
1. Kotak Pengaduan pada Pengadilan Agama Sengeti
2. Kotak Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3. Kotak Pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

PENGADILAN AGAMA SENGETI



2024

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL MONEV
PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN JANUARI



LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN JANUARI 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Agama Sengeti merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa sesuai visi Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Agama Sengeti menyadari tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap aparaturnya Pengadilan Agama Sengeti

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penguatan Pengawasan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Sengeti, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sengeti

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;**
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;P
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMANIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3	Website www.pa-sengeti.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4	Aplikasi SIWAS	-	-	Tidak ada pengaduan

III. TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tindak lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Januari 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
2	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
3	Website www.pa-sengeti.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
4	Aplikasi SIWAS	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil

IV. KESIMPULAN

Tidak ditemui adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengeti selama bulan Januari 2024, maka tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Sengeti agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengaduan masyarakat sebagaimana bulan Januari 2024 ini.

V. REKOMENDASI

Diharapkan Pengadilan Agama Sengeti dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif, sehingga meniadakan pengaduan yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat.

Sengeti, 31 Januari 2024

Koordinator Penguatan Pengawas



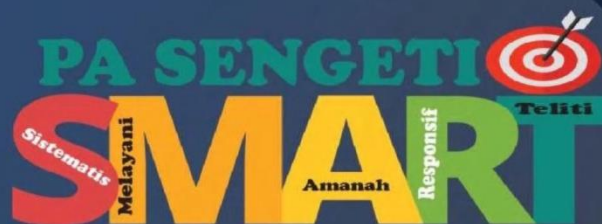
H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I..
NIP. 197601062001121002

PENGADILAN AGAMA SENGETI



2024

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL MONEV
PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN FEBRUARI



LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BULAN FEBRUARI 2024

III. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Sengeti telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan Pengadilan Agama Sengeti merupakan upaya mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa sesuai visi Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Agama Sengeti menyadari tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap aparaturnya Pengadilan Agama Sengeti

B. Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penguatan Pengawasan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Sengeti, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Petugas Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Sengeti

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;**
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;P
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMANIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3	Website www.pa-sengeti.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4	Aplikasi SIWAS	-	-	Tidak ada pengaduan

III. TINDAK LANJUT ATAS HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tindak lanjut Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Februari 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sarana Pengaduan	Jenis Pengaduan	Penanganan Pengaduan	Keterangan	Tindak Lanjut
1	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
2	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
3	Website www.pa-sengeti.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil
4	Aplikasi SIWAS	-	-	Tidak ada pengaduan	Nihil

VI. KESIMPULAN

Tidak ditemui adanya pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengeti selama bulan Februari 2024, maka tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik di Pengadilan Agama Sengeti agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengaduan masyarakat sebagaimana bulan Februari 2024 ini.

VII. **REKOMENDASI**

Diharapkan Pengadilan Agama Sengeti dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif, sehingga meniadakan pengaduan yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat.

Sengeti, 29 Februari 2024

Koordinator Penguatan Pengawas



H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I..
NIP. 197601062001121002

Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jenis Pengaduan	Jumlah	
	Pengaduan Diterima	Pengaduan Yang Telah Ditangani
Laman	Nihil	Nihil
Pengaduan disampaikan langsung	Nihil	Nihil
Surat	Nihil	Nihil
Telephone	Nihil	Nihil
Email	Nihil	Nihil

